

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi.

Politik kebangsaan merupakan penerimaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai hasil konsensus seluruh bangsa Indonesia yang didalamnya kita harus berkomitmen dan terlibat aktif untuk menjaga keutuhannya, dengan tidak mempersoalkan identitas-identitas tertentu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hubungan interaksi yang baik akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas sehingga setiap permasalahan dapat dipecahkan dengan asas kekeluargaan demi mencapai perdamaian. *‘Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan*

¹ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 28.

*yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.*²

Nahdlatoeel Oelama (NO) sebagai basis organisasi kaum tradisional Islam Indonesia yang terdiri atas para kiai dan santri di Jawa telah memainkan peran yang sangat penting dalam menyusun barisan anti penjajahan. Ketika organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab CChasbullah, tujuan awalnya memang bukan untuk menciptakan kekuatan politik riil yang secara frontal melawan penguasa Belanda. Ia lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pendalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia” yang oleh “kaum pembaru” dianggap *bid’ah* karena menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.³

Sejatinya pemaknaan Nahdlatul Ulama (NU) perlu dilihat dari alur-alur yang dilalui NU sendiri dalam hubungannya dengan NU-Bangsa, dalam fase-fase tertentu, termasuk zaman Soeharto, yang mensyaratkan melihat NU secara menyeluruh meskipun tentu tidak mungkin bisa mendalam. Dari sejarah NU-Bangsa, dapatlah dipahami

² Dalam Preambule Alinea 3 *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), Cet. Ke-14, h. 2.

³ Fathur Zen, *NU Politik Analisis Wacana Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2004) h.13.

bahwa: NU tidaklah tunggal, tetapi selalu berbelok-belok, dan fase pada zaman kini hanyalah salah satu saja dari apa yang telah dilalui NU.

KH. Wahab Chasbullah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kalangan pesantren, dan dari sini kemudian membentuk Komite Hijaz dalam sebuah rapat di Surabaya 31 Januari 1926, dan sekaligus membentuk organisasi bernama NO (Nahdlatul Ulama). Menurut Deliar Noer (1980), dua orang utusan gagal berangkat ke Makkah karena terlambat memesan tiket kapal, dan kemudian surat dikawatkan ke Arab Saudi. Baru pada 1928 utusan dari NU bisa diterima oleh Ibnu Su'ud, dan meminta agar raja dan pemimpin Wahhabi itu menghormati praktik-praktik madzhab. Permintaan ini berhasil dan dijawab dengan baik, tetapi tetap saja praktik-praktik madzhab diberi catatan "harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah".⁴

KH. Wahab Chasbullah adalah seorang ulama Indonesia yang pertama kali memaknai *nation state* atau nasionalisme berdasarkan nilai Islam dan budaya Indonesia, sehingga pada hakikatnya memudahkan penerimaan konsep Pancasila sebagaimana yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Negara Bangsa yang

⁴ Nur Khalik Ridwan, *NU DAN BANGSA 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010) h. 33.

berlaku di Indonesia tidak sama dengan yang ada di Barat. Nasionalisme Indonesia selain mengandung nilai-nilai Islam juga mengacu pada nilai-nilai sejarah Nusantara, sehingga agama dengan negara hanya bisa dibedakan, tetapi sama sekali tidak bisa dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Di situ terdapat hubungan simbiosis mutualistik antara agama dengan negara.

Maka untuk pembahasan lebih lanjut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“POLITIK KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA PERSPEKTIF KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk spesifikasinya penulisan skripsi ini hanya memfokuskan pada masalah Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif KH. Abdul Wahab Chasbullah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana politik kebangsaan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana politik kebangsaan menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah?

D. Tujuan Penelitian

Dalam perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui politik kebangsaan menurut Nahdlatul Ulama
2. Untuk mengetahui politik kebangsaan menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah

E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

Penulis berharap bahwa masalah yang diteliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri secara pribadi maupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat ditinjau dari aspek teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teroretis:
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah
 - b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan tentang politik kebangsaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai politik kebangsaan menurut Nahdlatul Ulama
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik kebangsaan menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu :

Nama	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbandingan
<p><i>Hartono</i> <i>NIM:</i> <i>08120028</i> <i>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i></p>	<p><i>“Kontribusi KH. Wahab Chasbullah dalam Berorganisasi (1914-1971 M)</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>behaviorisme</i> metode yang digunakan ialah penelitian sejarah. KH. Wahab Chasbullah</p>	<p>Dalam skripsi Hartono ini lebih konsentrasi pada pembahasan peran Kiai Wahab Chasbullah dalam kontribusi berorgansasi saja, lain</p>

<i>Tahun 2015</i>		merupakan salah satu ulama yang mampu memobilisasi masa dalam berorganisasi dimulai dari Sarekat dagang Islam Cabang Makkah, taswirul Afkar, Nahdlatul wathan, berbeda dengan beberapa ulama yang lainnya yang konsentrasi pada dunia pesantren.	halnya dengan yang penulis sajikan dalam kesempatan ini konsentrasi pada kiprah diplomasi KH. Abdul wahab Chasbullah dalam politik kebangsaan.
<i>Arina Wulandari</i> <i>NIM:</i> <i>A0.22.12.042</i> <i>UIN Sunan Ampel</i> <i>Surabaya</i>	<i>“KH. Abdul Wahab CChasbullah: Pemikiran dan Peranannya dalam Taswirul</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah diantaranya heuristik, verifikasi serta historiografi. KH. Wahab Chasbullah	Dalam skripsi ini yang disusun oleh Arina Wulandari konsentrasi pada pembahasan sepak terjang KH. Abdul Wahab CChasbullah dalam

<p><i>Tahun 2016</i></p>	<p><i>Afkar (1914-1926 M)</i></p>	<p>peranan dan pemikirannya dalam wadah Taswirul Afkar merupakan tonggak utama perintisan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, di Taswirul Afkar Kiai Wahab memulai perannya sebagai organisatoris ulung. Taswirul afkar merupakan Forum Diskusi.</p>	<p>sumbangsih pemikirannya di organisasi Taswirul Afkar. Sedangkan penulis lebih konsentrasi pada Bagaimana Politik Kebangsaan KH Abdul Wahab Chasbullah</p>
--------------------------	-----------------------------------	---	--

Dari judul-judul penelitian yang tertera dalam tabel, masih ada beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Politik di antaranya ada beberapa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh barat maupun Timur. Namun dari sekian banyak tokoh-tokoh yang dibahas,

penulis yakin dari semua penelitian tokoh yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, belum ada yang membahas mengenai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif KH. Abdul Wahab Chasbullah, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dalam judul skripsi.

G. Kerangka Pemikiran

Diskursus pemikiran hubungan Islam dengan politik, dapat dilihat dari sudut pandang rekapitulasi dan deskripsi sejarah praktek penyiaran agama oleh Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan praktek politik di Madinah. Beberapa pemaparan kuno (sumber-sumber klasik), begitu juga yang modern, menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, merupakan gambaran jelas hubungan antara negara dengan konstitusi ideal yang berkekuatan keTuhanan.⁵

Politik corak ini berusaha memperjuangkan sebuah tatanan bernegara dibawah panji Islam, hal ini selain berangkat dari pandangan akan kenyataan bahwa umat Islam adalah mayoritas dalam tubuh bangsa Indonesia, juga akibat adanya pemahaman bahkan keyakinan di

⁵ B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam, 2010), h. 1.

sebagian ummat Islam, bahwa mendirikan negara Islam (*Islamic State/Khilafah Islamiyah*) adalah kewajiban umat Islam menurut kelompok ini, Islam sebagai ajaran yang sempurna hanya akan bisa diterapkan secara total (kaffah), jika hadir sebagai agama (din) sekaligus negara (daulah) yang terwujud melalui pemerintahan, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki itu, “Islam” dapat mengatur segala aspek kehidupan.

Politik kebangsaan (nasionalisme) corak politik ini kerap kali dianggap tidak memiliki pijakan dalam agama (Islam) hal ini diakibatkan oleh cara pandang formalistic, karena melihat nasionalisme secara terminologis tidak terdapat dalam ensiklopedia dunia Islam, padahal secara substansial ia telah dipraktikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam bingkai negara Madinah berabad yang lampau.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren yang sekian banyaknya dan sekian luas pengaruhnya, tentu dimaksudkan untuk menempatkan posisi dan fungsi ulama sedemikian penting ditengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di Nahdlatul Ulama.⁶

⁶ Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran*, (Khalista: Surabaya, 2006) h. 32.

Nahdlatul Ulama terlahir bukan dari ruang kosong yang hampa atas segalanya. Nahdlatul Ulama terlahir dalam suasana sosial politik keagamaan dan kebangsaan yang sangat ketat dengan persinggungan kelompok-kelompok ekstern atau yang dari luar. Dalam segi sosial keagamaan berhadapan dengan kaum fundamentalis dan ekstrimis. Dalam konteks nasionalis kebangsaan Nahdlatul Ulama berhadapan dengan kelompok komunis yang juga telah mengadakan perlawanan kepada pemerintah hindia-belanda. Nahdlatul Ulama mampu memosisikan diri ditengah-tengah dinamika masyarakat dan bangsa Indonesia secara melebur dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Bicara soal Nahdlatul Ulama, yang terbayang tentu KH. Hasyim Asy'ari selaku *Rais 'Am* pertama dan sebagai figur yang disegani oleh berbagai ulama tanah air, tetapi ketika menilik lebih jauh kisah tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tentu tidak lepas dari buah atau hasil pemikiran, perjuangan serta peran KH. Wahab Chasbullah dalam upaya mendirikan. Ia merupakan seorang ulama yang mempunyai ide-ide brilian terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Dari pemikiran-pemikirannya itulah, ia diterima oleh banyak kalangan tradisionalis, modern dan komunis.

Nahdlatul Ulama diketahui khalayak umum sebagai organisasi yang berhaluan “tradisional” mayoritas dari kultural masyarakat yang dilawankan dengan “modernis”. Disebut demikian karena Nahdlatul Ulama memang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara warisan tradisi Islam yang disebut paham “*ahlussunnah wal jama’ah*” (aswaja) Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabisedangkan Wal Jama’ah ialah Penganut I’tiqad sebagai I’tiqad Jama’ah Sahabat-sahabat Nabi⁷. Sejatinya tradisi yang berkembang ditanah nusantara ini merupakan konsensus ulama yang konsentrasi pada bidang ilmu teologi, fiqh dan tassawuf. Nahdlatul Ulama dibidang teologi mengikuti tokoh ulama besar ilmu kalam yakni Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansyur Al-Mathuridi, bidang fiqh mengikuti empat imam madzhab yakni imam madzhab al-maliki, imam madzhab hanafi, imam madzhab hambali dan imam madzhab syafi’i.

Pemikiran KH. Wahab ini penuh dengan inspirasi, bagaimana seorang ulama yang hanya berpendidikan pesantren, tetapi mampu berpikir strategis saat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Beliau tipe kiai yang serba bisa, tidak hanya alim dalam agama, tetapi piawai dalam berpolitik, sehingga bisa bersahabat dan

⁷ K.H. Sirajuddin Abbas, *I’ Tikad Ahlussunnah Wal Jamah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1971) h. 13.

berdebat secara serius dengan aktivis politik terkenal berpendidikan Barat, seperti Dr. Soetomo, Dr. Rajiman, Ir. Soekarno, Dr. Doues Dekker, H.O.S. Cokroaminoto, dan sebagainya.

Kiai Wahab hadir dipentas politik nasional tidak hanya sebagai “pupuk bawang”, sebagai pelengkap tetapi hadir memberikan solusi, saat yang lain menghadapi jalan buntu, beliau hadir membuka celah memberikan cara pandang lain dan menciptakan optimism serta harapan. Pemikiran ini tidak hanya cukup dikenang sebagai kebanggaan saja, tetapi ini sebuah modal penting bagi kader Nahdlatul Ulama khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya sebagai dasar untuk mengembangkan politik yang khas Indonesia, sebagai dasar membangun Indonesia masa depan.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen,

sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas⁸. Yang nantinya menjadi bahan materi untuk dibahas. Metode ini digunakan untuk mengetahui Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif KH Abdul Wahab Chasbullah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa serta sejarah, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Mengingat obyek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan metode historis. Karena materi ini berkesinambungan dengan historis maka perlu dilihat benang merahnya dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan

⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber yaitu :

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yaitu buku karangan KH Abdul Wahab Chasbullah, *Kaidah Berpolitik & Bernegara* buku tersebut disunting oleh Abdul Mun'im DZ.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁹

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yakni penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut¹⁰. Pengumpulan metode data ini dengan cara mengumpulkan data-data dari buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penelitian hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode analisis Deskriptif Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga

¹⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat....*, h. 97

dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas¹¹. Dan metode penelitian dalam pendekatan kualitatif (*Qualitative*) yang artinya bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik.¹²

6. Teknik Penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h. 66

¹² Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.39

BAB II. Biografi KH. Abdul Wahab Chasbullah, meliputi :
Latar Belakang Keluarga, Silsilah Kiai Wahab, Masa Pendidikan dan Pengalaman, Latar Belakang Sosial Politik, Karya-karya Kiai Wahab, Wafatnya Kiai Wahab.

BAB III. Tinjauan Teoritis Tentang Politik, meliputi: Pengertian Politik, Teori Politik, Aspek-aspek dalam ilmu Politik, Konsep-konsep dalam Ilmu Politik, Perkembangan Ilmu Politik, Tokoh-tokoh Ilmu Politik.

BAB IV. Pemikiran KH. Abdul Wahab Chasbullah mengenai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama, meliputi : Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama dan Politik Kebangsaan menurut KH Abdul Wahab Chasbullah

BAB V. Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

Lampiran-lampiran